



KR-Surya Adi Lesmana

**PAKET MOTOR PASCA-IDUL FITRI: Paket sepeda motor yang dikirim menggunakan kereta api terparkir di KAI Logistik Cabang Lempuyangan, Bausasaran, Yogyakarta, Kamis (10/4/2025). Jasa paket via kereta api melonjak karena pemudik memilih mengirim sepeda motornya ke kampung halaman untuk dikendarai saat berlebaran.**

## Program Amnesti Massal Masih dalam Proses

JAKARTA (KR) - Komisi XIII DPR RI menyebutkan, program amnesti (pengampunan hukuman) massal yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto masih dalam proses serta verifikasi warga binaan yang menerima manfaat program tersebut. Dari laporan kementerian terkait, sudah ada 14 ribu warga binaan yang terverifikasi akan menerima amnesti.

"Program amnesti massal ini masih dalam proses. Semangat program amnesti massal ini adalah kemanusiaan. Hal ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso di Aceh Besar, Kamis (10/4). Pernyataan tersebut di-

sampaikan Sugiat Santoso di sela-sela kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh di kawasan Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, program amnesti atau pengampunan hukuman kepada warga binaan bersifat kemanusiaan.

Artinya, para penerima amnesti tersebut merupakan warga binaan yang usianya sepuh dan punya penyakit akut, walaupun masa hukumannya masih lama.

Kemudian, amnesti juga diberikan kepada pengguna narkoba bukan pengedar. Pengguna narkoba diberikan amnesti dalam rangka mengikuti rehabilitasi, sehingga terlepas dari

ketergantungan memakai barang terlarang.

"Selanjutnya, amnesti diberikan kepada terhukum yang sifatnya demokratisasi seperti pelanggaran undang-undang ITE maupun mereka yang menuntut kemerdekaan yang tidak bersenjata di Papua," tambahnya.

Tentunya, kata Sugiat Santoso, mereka yang direkomendasikan mendapatkan amnesti tersebut berkelakuan baik, sudah mengikuti program pembinaan di lapas serta tidak mengulangi lagi tindakan yang pernah dilakukannya.

"Kami terus mengawal program amnesti massal ini, karena semangatnya kemanusiaan," kata Sugiat Santoso. (Ant/Obi)-d

## PADA MASA PANCAROBA

# Banjir Masih Berpotensi Terjadi

JAKARTA (KR) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor selama masa peralihan musim (pancaroba) yang diperkirakan berlangsung sepanjang bulan April ini.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, peralihan musim atau masa pancaroba kerap disertai cuaca ekstrem, seperti hujan lebat berdurasi singkat, angin kencang, petir, serta potensi terjadinya angin puting beliung dan hujan es.

"BNPB mendorong masyarakat agar selalu memperhatikan prakiraan cuaca harian dan menyiapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing," kata Abdul di Jakarta, Kamis (10/4).

BNPB terus memantau per-

kembangan cuaca dan kejadian bencana di berbagai daerah serta mengingatkan Pemerintah Daerah untuk sigap dalam menghadapi potensi bencana selama peralihan musim. "Intinya, kesiapsiagaan mengantisipasi risiko menjadi penting, jangan tunggu bencananya datang dulu," tegasnya.

Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Jawa Tengah (Jateng)

pada 11-13 April 2025.

"Berdasarkan informasi dinamika Atmosfer yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Ahmad Yani Semarang, ada tiga faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Kamis.

Menurut Teguh, ketiga faktor tersebut meliputi keberadaan bibit Siklon Tropis 96S di Laut Arafura bagian Barat yang menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan di wilayah Jateng. Selain itu, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas.

La mengatakan, potensi cuaca ekstrem tersebut turut dipicu oleh labilitas lokal kuat yang mendu-

kung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng. "Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jateng pada 11-13 April 2025," katanya menegasikan.

Dikatakan, wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem pada Jumat (11/4) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/ Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Temanggung, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes, dan sekitarnya. (Ant/San)-f

## KASUS KORUPSI IKLAN BANK BJB KPK Pastikan Periksa Ridwan Kamil

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Penyidik KPK memastikan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus tersebut.

"Secara umum, tentunya akan ada klarifikasi kepada yang bersangkutan (Ridwan Kamil). Hal ini terkait alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan dari rumah yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (10/4).

Tessa mengajak semua pihak untuk menunggu pelaksanaan pemeriksaan kasus tersebut. Pasalnya, dalam hal ini KPK belum selesai memeriksa saksi-saksi internal Bank BJB maupun pihak vendor yang memenangkan pengadaan iklan tersebut.

Tessa mengungkapkan, sepanjang pengetahuan dirinya, pemeriksaan terhadap kasus ini belum selesai. "Jadi, kalau konteksnya adalah pemeriksaan, itu ya masih berlangsung," ungkapnya.

KPK, sebelumnya menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada Bank BJB. Terkait pengeledahan di rumah Ridwan Kamil, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen. (Ful)-d

## PENATAAN KAWASAN STASIUN LEMPUYANGAN Sultan Ingin Dengarkan Kedua Belah Pihak

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mau memberikan banyak komentar terkait adanya polemik antara warga RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasaran, Danurejan, Yogyakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penataan di Kawasan Stasiun Lempuyangan.

Sultan mengaku belum mengetahui secara detail persoalan tersebut. Untuk itu Sultan merasa penting untuk mendengarkan keterangan atau penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

"Saat ini saya belum mengetahui persoalan detailnya seperti apa. Jadi saya tidak ada pernyataan, nanti akan menimbulkan masalah baru. Nanti saja saya dengar dulu dari kedua belah pihak," kata Sultan HB X di Kepatihan, Kamis (10/4).

Sultan akan mendengar keterangan dari

kedua belah pihak. Namun urusan itu ia serahkan kepada putri sulungnya, GKR Mangkubumi selaku Penghageng Datu Dana Suyasa. Jadi penjelasan soal status lahan di Kawasan Stasiun Lempuyangan diserahkan kepada GKR Mangkubumi.

"Wah soal itu aku kurang ngerti ya, sing ngerti kan Mangkubumi. Aja takon aku," terang Sultan.

Menanggapi polemik penataan Kawasan Emplasemen Stasiun Lempuyangan yang berujung penolakan warga, Sultan menyatakan akan mempelajari duduk perkara yang ada sebelum mengambil sikap. Ditegaskan pula pentingnya menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan dialog. "Ya coba nanti kita selesaikan, bagaimana pun harus selesai itu kalau itu ada masalah. Tapi saya belum tahu kepastiannya," ungkapnya. (Ria)-f

## Malfungsi ..... Sambungan hal 1

walaupun definisi yang sebenarnya tidak sama. Judul yang lebih pas untuk artikel ini adalah: Mengapa Militer Tidak Boleh Berkuasa?

Pada umumnya sikap anti UU-TNI didasarkan pada kekhawatiran terhadap bangkitnya kembali rejim dwifungsi ABRI yang mengganggu kekuasaan era Orde Baru selama 32 tahun. Hanya sedikit yang menyampaikan kekhawatiran (atau ketidaksetujuan) UU-TNI berdasarkan pertimbangan lain.

Bahwa dwifungsi ABRI telah menghancurkan kehidupan keluarga PKI (yang belum tentu benar-benar PKI) hingga bertahun-tahun setelah peristiwa G30S/PKI 1965, adalah kenyataan yang tidak perlu dibantah. Bahwa parlemen kita pernah punya fraksi ABRI, adalah cerita konyol yang tidak perlu diperdebatkan. Bahwa dulu posisi bupati dan walikota adalah jatah para kolonel, gubernur jatahnya para brigjen adalah benar adanya walaupun aneh kedengarannya. Oleh karena itu, kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI atas disahkannya UU-TNI menjadi seolah-olah paling benar. Padahal ada alasan lain yang lebih substansial.

Kalau menyimak delapan negara dengan pemerintahan militer yang ada saat ini: Mali, Myanmar Chad, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Niger, Gabon, di tambah dengan yang semi-junta-militer seperti di Thailand (karena disetujui oleh Raja), dan sejarah rejim Orde Baru tadi tidak satupun cerita tentang pemerintahan militer yang diawali oleh perubahan yang konstitusional. Semuanya karena kudeta, karena pengambil-alihan kekuasaan melalui kekerasan, walaupun alasannya bisa karena korupsi yang merajalela, karena pemimpin sipil yang kurang becus atau karena apa saja.

Selain mengesampingkan konstitusi, alasan naiknya militer di panggung politik adalah (seolah-olah) karena kompetensi. Militer pasti

lebih tegas, lebih disiplin, lebih di segalanya. Oleh karena itu, selain buru-buru mengubah (mengakomodifikasi) Undang-undang, masyarakat dijejali narasi bahwa militer adalah anak bangsa yang paling nasionalis. Padahal tidaklah demikian.

Kalau soal kompetensi, undang-undang kita sudah memungkinkan anak di bawah usia boleh menjadi Wakil Presiden bukan? Berarti ketiaptantasan militer memimpin negara bukanlah karena kompetensi orang-per-orang. Melainkan karena dilihat dari struktur penyelenggaraan pemerintahan negara modern, militer adalah sekedar alat negara, sama dengan pegawai negeri, sama dengan aparat sipil negara (ASN). Yang membedakannya adalah bahwa militer (termasuk polisi) adalah aparat yang dipersenjatai.

Semua pihak harus tahu bahwa penyelenggara negara adalah pejabat politik yang dipilih melalui pemilu (election) dibantu oleh aparat negara (sipil maupun militer).

Oleh karena itu, prasyarat pemilu menjadi penting (walaupun pemilu bisa saja diakali) bagi pimpinan penyelenggara negara. Aparat militer tidak saja tidak pantas menduduki jabatan pimpinan sipil, melainkan juga harus mundur terlebih dahulu dari posisi militernya.

Seorang sekretaris daerah (yang adalah aparat sipil) pun tak boleh menduduki jabatan Bupati/Walikota atau Gubernur misalnya, kecuali mengundurkan diri dan turut kompetisi dalam pemilihan. Jadi militer lebih terhormat kalau mereka berkhidmat di barak, menjadi aparat penyelenggara negara. Di negeri manapun, kalo ada kolonel menjadi presiden maka terjadi error fungsi, terjadi mal-fungsi. □-f

(Penulis, Guru Besar emeritus Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

## CUM DATE JATUH PADA 10 APRIL 2025 Jangan Lewatkan Kesempatan Dapatkan Dividen Rp 31,4 Triliun dari BBRI

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menetapkan Kamis, 10 April 2025 sebagai cum date pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 di pasar reguler dan negosiasi. Adapun, cum date atau cumulative date sendiri menjadi tanggal penentu bagi investor yang berhak memperoleh dividen.

Pembagian dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/03) di Jakarta, disepakati bahwa total dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp 51,73 triliun atau Rp343,40 per saham. Angka ini termasuk dividen interim sebesar Rp135 per



BRI telah menetapkan Kamis, 10 April 2025 sebagai cum date pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 di pasar reguler dan negosiasi. KR-Istimewa

saham (setara Rp20,33 triliun) yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2025. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau Rp208,40 per saham.

Dari total dividen tersebut, berdasarkan struktur kepem-

lihan saham maka BRI akan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp10,88 triliun yang telah lebih dahulu dibayarkan. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen ini dilakukan dengan mempertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan struktur modal yang kuat.

"BRI mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan besaran dividen, termasuk kebutuhan ekspansi bisnis, kecukupan likuiditas, dan manajemen risiko bank. Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan pun diproyeksikan tetap terjaga di atas 19% dalam jangka panjang," ujar Hendy.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 31 Desember 2024, di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp 60,15 triliun. (\*)

KEGIATAN	TANGGAL
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 April 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 April 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	14 April 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	15 April 2025
Recording Date / Daftar Pemegang Saham (DPS)	14 April 2025 pukul 16.15 WIB
Pembayaran Dividen Tunai	23 April 2025



Pembagian dividen merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham, Dalam RUPST yang digelar pada Senin (24/03) di Jakarta. KR-Istimewa